

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sejenis telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti penelitian oleh Yaniar, dkk. (2016) yang dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Ponorogo dengan data tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit untuk meminimalisir kredit modal kerja bermasalah Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Probolinggo telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan teori yang ada.

Penelitian yang sejenis juga telah dilakukan oleh Wati (2018) yang dilakukan pada Bank BNI Syariah dengan data tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa kredit macet terjadi dikarenakan petugas dalam menyalurkan pembiayaan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan terdapat korelasi antara penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hardiyati, dkk. (2018) yang dilakukan pada Bank Mandiri kantor cabang Jakarta Mampang Prapatan dengan data tahun 2016 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang juga tertera dalam kebijakan perkreditan telah sesuai. Akan

tetapi, mikro bank mandiri cabang mampang belum maksimal dalam menerapkan manajemen risiko disetiap aktivitas kreditnya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anton dan Syafi'i (2018) yang dilakukan pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di Pekanbaru dengan data tahun 2018 menunjukan bahwa selama periode pengamatan kebijakan perbankan terkait penyaluran kredit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) cabang Pekanbaru telah menggunakan prinsip 5C.

B. Tinjauan Teori

1. Keputusan Penyaluran Kredit

Saat melakukan penyaluran kredit, bank perlu melakukan analisis untuk menilai suatu permohonan yang telah diajukan oleh debitur (Ismail, 2010:111). Penyaluran kredit kepada nasabah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang jelas dan tegas yang wajib dimuat dalam setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB). Kebijakan ini minimal harus meliputi kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara penilaian suatu kredit, profesionalisme dan integrasi pejabat perkreditan (Firdaus dan Maya, 2003:42)

Sistem pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh bank merupakan suatu jaringan prosedur yang telah dibuat sesuai dengan pola yang terpadu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok bank.

Menurut (Suyatno dkk, 2003:69) urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani bank yaitu

- a. Permohonan kredit
- b. Penyidikan dan analisis
- c. Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan
- d. Pencairan kredit
- e. Administrasi
- f. Pengawasan dan pembinaan
- g. Pembayaran dan pelunasan kredit

Bank dalam memutuskan pemberian kredit kepada nasabah memiliki prinsip dasar. Menurut Kasmir (2002: 117-119) prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dapat dilakukan melalui penilaian kredit terbagi 5 yang dikenal dengan prinsip 5C dan ditambah 1C menurut yaitu

a. *Character*

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur memiliki karakter yang baik dan jujur sehingga calon debitur memiliki niat dan komitmen untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampainya dengan lunas.

b. *Capacity*

Calon debitur yang akan melakukan pinjaman kredit sebelumnya akan dianalisis oleh pihak bank untuk mengetahui

kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit. Analisis ini dasarnya menjadikan bank mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut..

c. *Capital*

Modal merupakan dana yang dimiliki oleh calon debitur. Seberapa besar dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur maka pihak bank akan semakin yakin atas keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.

d. *Condition*

Kondisi perekenomian harus dianalisis oleh bank untuk mempertimbangkan apakah kondisi ekonomi calon debitur berpengaruh pada usaha calon debitur dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi usaha yang dibiayai sebaiknya memiliki prospek yang baik sehingga kredit bermasalah yang timbul relatif kecil.

e. *Collateral*

Collateral atau Jaminan merupakan sumber pembiayaan kedua jika calon debitur tidak dapat membayar angsurannya atau dikenal dengan kredit macet. Jaminan calon debitur bisa bersifat fisik atau non fisik. Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai agunan yang harus diteliti nilai keabsahaan dan kesempurnaan sehingga jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepatnya jika terjadi suatu masalah.

f. *Constraint*

Hambatan dan batasan yang tidak dapat memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. (Maya, 2012:101).

2. Faktor-faktor penentu dalam kebijakan penyaluran kredit

Menurut Rivai (2006:97) terdapat faktor-faktor penting dalam kebijakan kredit antara lain:

- a. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
- b. Kebijakan perkreditan yang jelas yang menjadi salah satu upaya untuk mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat.
- c. Kebijakan perkreditan bank berperan sebagai panduan dalam melaksanakan seluruh kegiatan perkreditan bank.
- d. Berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia yang dapat memastikan bahwa bank telah memiliki kebijakan kredit yang sehat.
- e. Kebijakan perkreditan perbankan dikatakan baik bila kebijakan tersebut mencakup: prinsip kehati-hatian perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan perkreditan, dokumentasi dan administrasi, pengawasan kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

3. Kebijakan Kredit dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Kebijakan kredit perlu ditetapkan agar setiap bank memiliki dan menerapkan kebijakan kredit yang baik dan mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual serta memiliki standar yang mengandung pengawasan intern pada semua tahapan proses perkreditan.

Dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995 ditetapkan bahwa bank wajib membuat suatu kebijakan perkreditan yang mengatur hal-hal sebagai berikut secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman sehari-hari (Suhardjono, 2003:100) sebagai berikut:

a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dilakukan dengan membuat upaya batasan-batasan dalam bidang perkreditan antara lain prosedur pemberian kredit yang tepat, peringatan dini kredit bermasalah, penerapan asuransi dalam pemberian kredit, penerapan jaminan dalam pemberian kredit, dan penerapan profesionalisme pejabat kredit.

b. Organisasi dan manajemen perkreditan

Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern dimulai dari tahap awal proses kegiatan perkreditan sampai kredit lunas, bank diwajibkan

untuk memiliki perangkat organisasi perkreditan bank berupa struktur organisasi perkreditan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas masing-masing pejabat kredit, serta pemisahan antara bagian yang menanggapi permohonan kredit dan analisis kredit.

c. Kebijakan dan persetujuan pemberian kredit

Dalam kebijakan persetujuan kredit termuat pedoman dalam pemberian kredit yang sekurang-kurangnya mencakup informasi kredit, prosedur pengajuan kredit, pencairan kredit, dan pembayaran/pelunasan kredit.

d. Dokumentasi dan administrasi kredit

Dokumentasi kredit wajib dilaksanakan dengan baik, tertib dan lengkap karena dokumentasi kredit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paket kredit dan merupakan salah satu aspek terpenting yang dapat menjamin pengembalian kredit..

e. Pengawasan kredit

Setelah kredit dicairkan pengawasan kredit sangatlah penting karena fungsi pembinaan dan pengawasan dapat mengantisipasi timbulnya risiko kerugian dalam pemberian kredit.

f. Pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah

Pengelolaan kredit bermasalah secara efektif memiliki pengaruh penting untuk menjaga kualitas portofolio kredit. pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh

melalui informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, alat yang digunakan untuk mendeteksi secara dini timbulnya kredit bermasalah, evaluasi secara kesinambungan, dan penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan restrukturisasi kredit.

4. Tindak Lanjut Implementasi Kebijakan Kredit

Kolektibilitas kredit menggambarkan penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau bunga dan angsuran pokok yang dilakukan oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Mahmoeddin, 2010:10).

Menurut Totok dan Nuritomo (2014:150) kriteria kualitas kredit adalah sebagai berikut

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

Dalam pemberian kredit, seorang analis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit yang disalurkan akan selalu berjalan baik walau telah dilakukan analisis secara seksama (Ibrahim, 2004:109).

Menurut Suhardjono (2003:272-273) ada beberapa upaya penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan cara perubahan *grace period*, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu dan perubahan jumlah angsuran.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

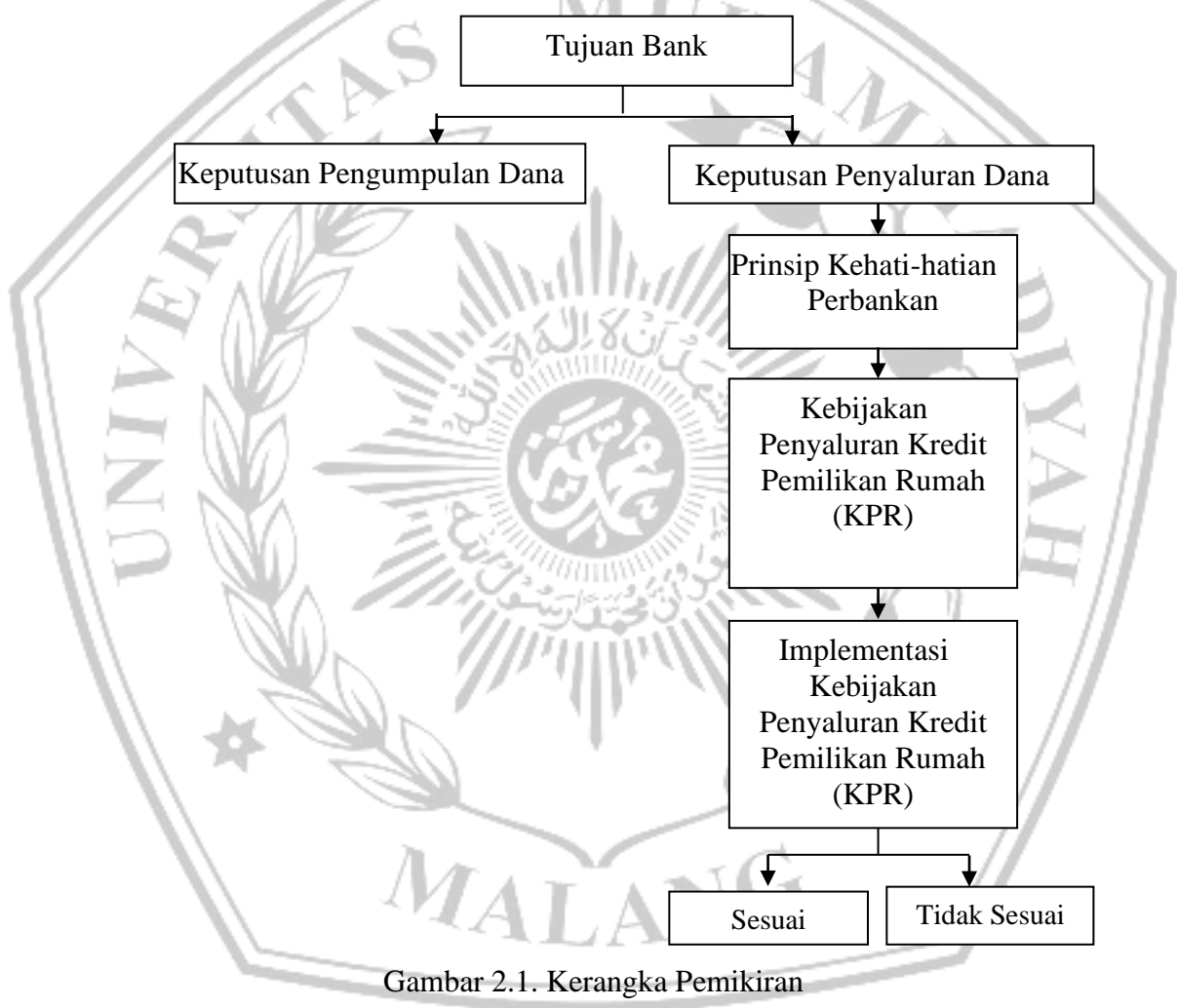
Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak menyangkut maksimum saldo kredit yang dapat dilakukan dengan cara perubahan tingkat suku bunga/denda, perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga, keringanan bunga/denda, dan perubahan/penggantian, kepemilikan, nama, nasabah dan agunan.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali dengan merubah syarat-syarat kredit yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning* atau penambahan dana bank, pengurangan tunggakan pokok, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, perubahan jenis fasilitas kredit, konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan dan penjualan agunan/aset debitur.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah proses penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan oleh peneliti, kerangka pikir penelitian yang telah dibuat oleh peneliti dapat dilihat dalam Gambar 2.1



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Tujuan bank pada dasarnya menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat sehingga panyaluran dana dalam bentuk kredit merupakan salah satu tujuan bank. Pelaksanaan kredit dilakukan dan

harus diimplementasikan dengan baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank serta prinsip kehati-hatian perbankan. Implementasi kebijakan penyaluran kredit yang baik tentunya akan meminimalisir timbulnya kredit bermasalah.

